



**PENGADILAN AGAMA
MAJENE**

P E N E T A P A N

**PERKARA NOMOR
35/Pdt.P/2018/PA.Mj**

**TANGGAL
17 Januari 2018**

**PEMOHON
Abdullah Djafar bin Muhammad Djafar**

2018



98

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Abdullah Djafar bin Muhammad Djafar, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan laundry, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan seorang perempuan bernama Wulandari binti Ari Darma, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj



28

surat Nomor B-012/KK.31.022.5/Pw.01/01/2018 tanggal 5 Januari 2018, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar dengan Wulandari binti Adi Darma dengan alasan anak Pemohon, Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar dengan perempuan Wulandari binti Adi Darma sudah saling mengenal dan keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wulandari binti Ari Darma;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj



17

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Nomor B-012/KK.31.02.5/Pw.01/01/2018, tanggal 05 Januari 2018, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503083341, tertanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/IST/94/XI/2012, tertanggal 03 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Yakub Djafar bin Muhammad Djafar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena belum cukup umur;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj



Handwritten signature

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Zulkarnain, berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Wulandari, berumur sekitar 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya keduanya sudah agak lama berpacaran;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah melakukan lamaran kepada pihak keluarga Wulandari dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
2. Mukarrabin bin Muhammad Ali K, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Zulkarnain, berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Wulandari, berumur sekitar 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya keduanya sudah agak lama berpacaran;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj



ff

- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah melakukan lamaran kepada pihak keluarga Wulandari dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar, umur 18 tahun, dengan seorang perempuan bernama Wulandari binti Ari Darma, umur 19 tahun, karena keduanya sudah agak lama berpacaran dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj



11

tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar adalah anak kandung Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar telah berumur 18 tahun dan anak tersebut adalah anak Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yakub Djafar bin Muhammad Djafar dan Mukarrabin bin Muhammad Ali K, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu poin 1 sampai 6 yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Zulkarnain Abdullah, umur 18 tahun, dengan seorang perempuan bernama Wulandari bin Ari Darma, umur 19 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya keduanya sudah agak lama berpacaran dan anak Pemohon telah menyatakan setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa antara anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis serta tidak ada larangan diantara keduanya untuk menikah secara hukum;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj



dilarang oleh agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjadi suami dan menjalankan tanggung jawab seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon istri anak Pemohon (Wulandari binti Ari Darma) dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa calon istri anak Pemohon secara fisik dan mental sudah siap untuk membina rumah tangga karena sudah berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya dapat dilaksanakan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae atau ditempat dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an dan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj



A

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درة المقاسد مُقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Wulandari binti Ari Darma, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Zulkarnain Abdullah bin Abdullah Djafar untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wulandari binti Ari Darma;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166000,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj



A

Hakim Anggota

Hairri Anwar, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Dewiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.35/Pdt.P/2018/PA.Mj